

BAB II

PROFIL DPD PSI KOTA SEMARANG DAN KONTEKS POLITIK KOTA SEMARANG

Partai Solidaritas Indonesia sebagai partai yang baru dibentuk dan memiliki identitas anak muda, mereka menerapkan pendekatan yang berbeda untuk membangun basis masa. Kaderisasi yang dijalankan tidak hanya sebagai formalitas belaka, tetapi menjadi bagian dari strategi adaptif untuk menjaring kader yang berpotensi dalam kontestasi politik lokal. PSI menerapkan sebuah mekanisme yang dimulai dari proses rekrutmen terbuka, pembinaan kader, seleksi pelatihan, hingga dinamika partisipasi politik perempuan.

Pada proses rekrutmen terbuka, PSI membuka kesempatan bagi siapapun untuk mendaftar dan menjadi bagian dari PSI. Mereka tidak menetapkan batas khusus bagi siapapun yang ingin menjadi bagian dari PSI. Tentunya setelah orang tersebut menjadi bagian dari PSI akan diberikan pemahaman yang lebih dalam tentang partai tersebut. Ideologi serta paradigma yang dimiliki oleh PSI harus menjadi pegangan serta diterapkan oleh seluruh kader. Strategi demikian menjadikan PSI sebagai partai yang terbuka, tetapi juga tetap menjaga kualitas kader mereka.

Hal tersebut termasuk ke dalam sistem pembinaan kader. Anggota yang telah menjadi bagian PSI akan diberikan pelatihan serta pembinaan untuk meningkatkan kualitas mereka. Sistem ini dimaksudkan agar kader PSI siap untuk melakukan serta menjalankan tugas kepartaian dengan maksimal karena mereka telah dibekali dengan ilmu yang telah mereka miliki. Dengan demikian hal yang

dicita-citakan serta hal yang menjadi tujuan PSI akan lebih mudah tercapai karena memiliki kader yang sesuai dengan paradigma yang mereka anut. Selain itu hal tersebut juga meningkatkan solidaritas antar anggota karena kesamaan pandangan.

Setelah anggota dibina hingga menjadi kader, mereka akan difasilitasi untuk mengikuti kaderisasi lanjutan. Dalam proses ini materi yang diberikan akan lebih kompleks. Kompleksnya materi disesuaikan dengan kebutuhan partai. Dengan demikian, ketika partai dihadapkan pada permasalahan yang serius, seperti kontestasi politik, mereka memiliki kader yang siap untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Proses ini juga akan melahirkan kader-kader yang berkualitas karena mereka telah dibekali oleh ilmu yang telah mereka dapatkan. Ketika telah banyak kader yang melewati sistem tersebut, mereka akan lebih siap untuk menghadapi dinamika politik. Sistem yang demikian membuka lebar kesempatan bagi siapapun yang tergabung PSI untuk berkontribusi lebih, utamanya bagi kader perempuan. Kader perempuan adalah kader yang rawan untuk mengalami alienasi. Namun, dengan ekosistem di internal PSI yang mendukung semua kader, termasuk perempuan, untuk berkembang akan membuka peluang mereka ikut andil dalam ruang-ruang yang lebih besar.

2.1 Gambaran Umum DPD PSI Kota Semarang

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI adalah partai yang secara resmi dibentuk pada tanggal 16 November 2014. Menurut Nugroho dan Yandes (2025) PSI dibentuk berdasarkan nilai anti korupsi dan anti toleransi. Kedua hal tersebut adalah acuan dasar yang digunakan oleh pendiri dalam membentuk PSI. Raja Juli Antoni, Grace Natalie, Isyana Bagoes Oka, dan dua orang lainnya

adalah penggagas awal dari Partai Solidaritas Indonesia. PSI membangun struktur organisasi dengan cara berjenjang dimulai dari pusat, provinsi, kabupaten atau kota, dan kecamatan. Dalam penyebutannya PSI menggunakan istilah DPP (pusat), DPW (provinsi), DPD (kabupaten atau kota), DPC (yaitu tingkat kecamatan). Pada penelitian ini akan lebih menekankan kepada bagian DPD (tingkat kabupaten atau kota). DPD adalah perwakilan organisasi partai pada tingkat kota atau kabupaten, penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, jadi secara khusus akan meneliti DPD PSI Kota Semarang.

Partai Solidaritas Indonesia sejak awal berkomitmen membentuk struktur dari tingkat pusat hingga tingkat kecamatan. Dengan kata lain, sejak awal dibentuknya mereka berkomitmen untuk membangun basis kekuatan hingga akar rumput. Bagi sebuah partai ini adalah hal yang penting apabila ingin menjadi partai yang besar. Basis akar rumput adalah kekuatan dari partai. PSI juga memiliki komitmen dalam keterwakilan perempuan, mereka menetapkan kuota minimum keterwakilan perempuan sebesar 30%, termasuk DPD.

Pada tingkatan DPD, PSI memiliki beberapa fungsi yang sesuai dengan AD/ARTnya, fungsinya meliputi kaderisasi dan rekrutmen lokal, konsolidasi dan organisasi partai di daerah, hingga representasi dan basis politik lokal. Semua hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat kader akar rumput yang dimiliki oleh PSI. Sebagai partai yang masih baru mereka perlu untuk menguatkan kaderisasi untuk memperkuat basis massa mereka, konsolidasi

dimaksudkan untuk menyelaraskan tujuan PSI dari pusat hingga ke akar rumput, bisa juga sebagai ajang untuk menyelenggarakan kegiatan, membina anggota, dan mengembangkan sayap partai. Namun, representasi dimaksudkan untuk menggalang dukungan dari masyarakat pada tingkat kota atau bawahnya.

2.2 Struktur Organisasi dan Mekanisme Kerja DPD PSI Kota Semarang

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DPD PSI Kota Semarang



Sumber: AD/ART PSI 2025

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Semarang merupakan struktur kepengurusan partai di tingkat daerah kabupaten/kota yang secara sederhana berfungsi sebagai penghubung antara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PSI yang tersebar di seluruh Indonesia. Berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI, struktur kepengurusan DPD PSI Kota Semarang terdiri atas pimpinan inti yang ditempatkan oleh ketua, sekretaris, dan bendahara DPD PSI Kota Semarang. Selanjutnya, di bawahnya adalah departemen-departemen

seperti Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu), Badan Saksi Daerah, Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK), serta biro-biro. Secara rinci, DPD PSI Kota Semarang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun program dan anggaran tahunan daerah, termasuk untuk lembaga-lembaga struktural di bawahnya, untuk kemudian disahkan sebagai bagian dari program Partai;
2. Menerima sumbangan, hibah, dan dana sukarela yang legal melalui koordinasi dengan Dewan Pimpinan Wilayah;
3. Menyusun laporan keuangan serta evaluasi akhir tahun secara berkala;
4. Merekomendasikan nama-nama calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota, serta calon Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota kepada Dewan Pimpinan Wilayah untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat;
5. Mengusulkan susunan pimpinan DPRD Kabupaten/ Kota dan komposisi fraksi kepada Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Wilayah;
6. Memimpin, mengesahkan, dan mengawasi lembaga-lembaga di bawah struktur Dewan Pimpinan Daerah;
7. Membentuk dan mengoordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai di tingkat daerah;
8. Mengesahkan kepengurusan Pimpinan Ranting di wilayah kerjanya;
9. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program kerja Dewan Pimpinan Cabang serta lembaga-lembaga terkait lainnya;
10. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan-kebijakan Partai di tingkat daerah

sesuai dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Rapat Paripurna Wilayah, Rapat Paripurna Daerah, serta peraturan Partai lainnya;

11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada peserta Rapat Paripurna Daerah secara berkala
12. Mengatur dan berkoordinasi dengan anggota legislatif dan eksekutif yang berasal dari kader Partai di tingkat daerah;
13. Melaksanakan rapat-rapat organisasi secara rutin di tingkat daerah untuk menjamin efektivitas kerja dan pelaksanaan program.

2.3 Konstelasi Politik Jawa Tengah

Jawa Tengah yang dihuni oleh 28 juta jiwa adalah salah satu provinsi terbesar di Indonesia. Penduduk yang beragam serta budaya yang masih terjaga di beberapa daerah menjadikan Jawa Tengah daerah yang kompleks. Tidak hanya dari budayanya saja, Jawa Tengah juga memiliki keberagaman etnis, agama, hingga tingkat pendidikan. Meskipun secara budaya masyarakat Jawa Tengah terkenal dengan keramahannya. Namun, Jawa Tengah tetap memiliki tantangan-tantangan sosial yang memengaruhi pelaksanaan Pemilu, hal-hal seperti masih kuatnya patron klien menjadikan Jawa Tengah daerah yang penuh dengan dinamika. Situasi seperti ini nampaknya dipahami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), selama puluhan tahun PDI-P menguasai Jawa Tengah dengan memenangkan Pemilu baik itu legislatif maupun eksekutif.

Perubahan terjadi pada Pemilu 2024, calon yang diusung oleh PDI-P kalah melawan calon dari koalisi selain PDI-P yaitu Ahmad Luthfi, tetapi pada tingkat legislatif PDI-P masih menjadi pihak yang paling kuat di Jawa Tengah. Kemenangan Ahmad Luthfi memberikan sinyal bahwa di Jawa Tengah apapun partainya dapat berkuasa mengalahkan PDI-P yang telah lama berkuasa di Jawa Tengah. Pada sisi lain terdapat banyak partai dan aktor yang terus mencoba naik di Jawa Tengah. Ini menunjukkan di Jawa Tengah masih terdapat ruang bagi partai yang baru dibentuk atau partai yang masih kecil, seperti PSI.

Beberapa survei pada tahun 2024 seperti Litbang menunjukkan bahwa PSI memang memiliki elektabilitas yang rendah. Hal tersebut dikarenakan umur PSI yang masih baru menjadikan PSI masih kurang dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah. Namun, terdapat individu yang tergabung di PSI memiliki elektabilitas yang tinggi. Apabila PSI mampu memanfaatkannya akan menjadi modal kekuatan bagi PSI untuk membangun partai mereka di Jawa Tengah. Dalam konteks Jawa Tengah beberapa partai besar memiliki mesin politik yang kuat di akar rumput. Mesin inilah yang belum dimiliki oleh PSI, apabila ingin berbicara lebih di Jawa Tengah, PSI harus memperkuat mesin politik mereka.

2.4 Kondisi Demografi Pemilih Kota Semarang

Per Juli 2024, jumlah penduduk Kota Semarang mencapai angka 1.708,833 ribu jiwa, dengan kepadatan penduduk 4.571 jiwa/km². Meskipun begitu, BPS Kota Semarang menyatakan bahwa penyebaran penduduk di masing-masing

kecamatan belum merata. Contohnya adalah Kecamatan Semarang Timur dengan total penduduk 12.260 jiwa/km² merupakan kecamatan terpadat di Semarang. Pada sisi lain kecamatan dengan kepadatan paling rendah 1.212/km² adalah Kecamatan Tugu (BPS Kota Semarang, 2025). Namun, berdasarkan jenis kelamin, total penduduk di Kota Semarang ini terbagi menjadi laki-laki sejumlah 845.177 dan perempuan sebanyak 863.656.

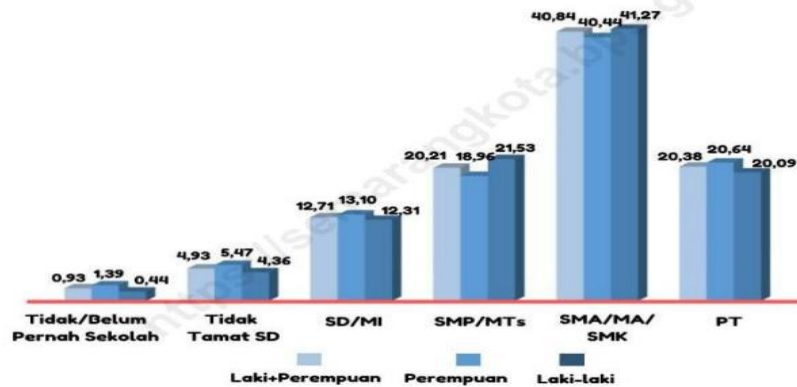
Pada tahun 2024 KPU menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Jawa Tengah sebesar 28,3 juta pemilih. Jumlah yang sangat besar ini menjadikan Jawa Tengah sebagai wilayah strategis dalam kontestasi politik. Dalam hal keberagaman, komposisi pemilih yang berada di Jawa Tengah termasuk ke dalam jenis relatif dan beragam. Bahkan DPT yang berada di Jawa Tengah didominasi oleh kelompok usia produktif. Berdasarkan jenis kelamin pemilih Jawa Tengah hampir sama, terdapat 14,1 juta pemilih laki-laki dan 14,1 juta pemilih perempuan. Kesetaraan jumlah menandakan bahwa representasi dan keterlibatan perempuan dalam politik memiliki basis demografisnya sendiri. Kota Semarang memiliki total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.265.192 pemilih yang tersebar di 16 kecamatan dan 177 kelurahan. DPT tersebut merupakan gabungan dari komposisi 651.441 perempuan dan 613.751 laki-laki. Berdasarkan komposisi tersebut dapat dilihat bahwa pemilih perempuan berjumlah lebih banyak dibanding laki-laki, yang mana meski sedikit tetap memengaruhi strategi kampanye caleg perempuan dan kurikulum kaderisasi DPD PSI Kota Semarang.

Adapun, apabila kita melihat dari usia pemilih Jawa Tengah didominasi oleh generasi muda dan usia produktif. Sekitar 32% adalah generasi milenial, 20% adalah generasi Z, dan 28% adalah generasi X, dan yang terakhir *baby boomer* memiliki jumlah pemilih paling sedikit. Dengan kata lain pemilih Jawa Tengah berada pada rentang usia 17-45 tahun. Pada hal geografis, pemilih Jawa Tengah tersebar di 29 kabupaten dan 6 kota. Persebaran ini menunjukkan bahwa partai politik yang ingin berkontestasi harus mampu menarik massa dari beberapa daerah tersebut.

2.5 Kondisi Pendidikan dan Ekonomi Pemilih Kota Semarang

Dalam kontestasi politik seperti Pemilu, latar belakang dari masing-masing pemilih memainkan peran signifikan dalam membentuk dan menentukan kebutuhan atas representasi politik di parlemen demi menjamin kebutuhan dan kepentingan individu terakomodasi dalam kebijakan. Secara garis besar, latar belakang sosial dan ekonomi membentuk sebuah pola unik di suatu wilayah yang mampu menjelaskan kebutuhan warga dari wilayah itu sendiri. Keadaan atau situasi makro dapat menjadi pengantar dalam menjelaskan situasi sosial dan ekonomi pada lapisan yang lebih dalam dan kompleks.

Gambar 2. 2 Grafik Pendidikan berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Semarang 2023



Sumber: Buku Statistik Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024

Secara makro, BPS Kota Semarang menyajikan data statistik pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Semarang pada 2024. Grafik tertinggi menunjukkan bahwa 40,84% penduduk 15 tahun ke atas menamatkan pendidikan sampai jenjang SMA/ sederajat, sedangkan lulusan perguruan tinggi mencapai 20,38%, dan ironisnya di samping itu masih ada sebesar 0,93% penduduk berusia di atas 15 tahun yang tidak/belum pernah mengenyam pendidikan formal (BPS Kota Semarang, 2025). Disparitas atau kesenjangan ini membentuk sebuah pola unik yang secara tidak kasat mata saling memengaruhi strategi politik caleg dalam Pemilu demi mengakomodasi suara sebanyak mungkin terlepas besarnya jurang atau *gap* latar belakang pendidikan di Kota Semarang.

Tabel 2.1: Persentase Jenis Pekerjaan Penduduk Bekerja Kota Semarang 2024

No	Penduduk Usia Kerja	Persentase
1	Buruh/karyawan/pegawai	61,09%
2	Berusaha sendiri	20,45%
3	Pekerja keluarga/tidak dibayar	6%
4	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga	5,79%
5	Berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar	4,02%
6	Pekerja bebas	2,64%

Sumber: Buku Statistik Pendidikan Kota Semarang Tahun 2024

Adapun secara ekonomi, data dari Badan Pusat Statistik Semarang (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 sebanyak 69,9% penduduk Kota Semarang adalah angkatan kerja, yang mana sisanya 30,1% bukanlah penduduk usia kerja. Penduduk bekerja di Kota Semarang tersebar dalam dua kategori, yaitu pekerja formal dan informal. Sebanyak 65,11% merupakan pekerja formal, dan 34,89% sisanya merupakan pekerja informal. Pada sisi lain sektor yang paling didominasi penduduk bekerja adalah sektor jasa dengan persentase sebesar 70,17%, lalu diikuti dengan sektor industri sebesar 27,64%, dan terakhir adalah pertanian sebesar 2,20%. Secara garis besar, menurut BPS Kota Semarang, persentase penduduk miskin Kota Semarang menurun sebesar 0,2% dari tahun 2023 menjadi 4,03% di tahun 2024. Kondisi ekonomi di Kota Semarang pada tahun 2024 ini juga memengaruhi pola dukungan masyarakat dalam Pemilu, utamanya Pemilu legislatif yang persebarannya sangat tersegmentasi berdasarkan dapil. Maka dari itu, kondisi

ekonomi juga menjadi dasar bagi kandidat caleg PSI dalam menyusun strategi dan program yang dapat meraih simpati dan suara dari masyarakat.